

# **PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA *VALUE FOR MONEY*** **(Survei Pada Pemerintah Daerah Kota Palu)**

**Liza Fajarningtyas<sup>1</sup>, Muslimin dan Dr. Abdul Kahar<sup>2</sup>**

*be\_liza@yahoo.co.id*

<sup>1</sup>*Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako*

<sup>2</sup>*Dosen Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*In the budget year of 2013-2015, the absorption of local government budgets in Palu City shows accumulation in the past three months. This condition can cause the loss of value for money in the governmental budget (BPKP, 2012). Performance-based budgeting can foster effective programs with an efficient use of funds to achieve the organizational goals (Young, 2003). Performance-based budgeting is designed to increase good governance such as transparency and accountability in making the decisions for resource allocation (Vian, 2013). Accountability will increase the responsibility of public officials in carrying out their duties based on the procedure in order to minimize inefficiency that leads to high cost and slowness of public services (Mardiasmo, 2009). This research applies quantitative approach with sample of 41 governmental units that selected through purposive sampling method. Data is analyzed with SEM-PLS method. The result show that: 1) the implementation of performance-based budgeting has a positive but insignificant influence on value for money performance; 2) performance-based budgeting has a positive and significant influence on good governance; 3) the application of good governance has a positive and significant influence on value for money performance; and 4) the implementation of performance-based budgeting has an indirect influence on value for money performance through good governance.*

**Keywords:** *performance-based budgeting, good governance, value for money, SEM-PLS*

*Value for money* disebut sebagai inti pengukuran kinerja sektor publik (Mahmudi, 2013:83). Oleh karena itu, *value for money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik. Permasalahan utama anggaran tradisional adalah tidak adanya perhatian terhadap konsep *value for money* (Mardiasmo, 2009:76). Pada akhir tahun seringkali terjadi kelebihan anggaran yang kemudian penggunaannya dipaksakan pada aktivitas yang kurang penting untuk dilaksanakan, semata-mata dimaksudkan untuk menghabiskan sisa anggaran, guna mengejar target realisasi anggaran.

Anggaran yang menumpuk di akhir tahun masih terjadi hingga saat ini, setelah diterapkannya anggaran berbasis kinerja. Tabel 1. menunjukkan serapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Palu pada akhir selama TA 2013-2015. Pada akhir September, realisasi anggaran masih mencapai 53-57%. Capaian ini berada di bawah target rencana serapan anggaran yang seharusnya berkisar di angka 80% pada akhir triwulan III. Hal ini berarti 30% lebih anggaran diserap dalam waktu 3 bulan terakhir dari tahun anggaran.

**Tabel 1. Serapan Anggaran Pemerintah Kota Palu**

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TA 2013	3.01%	7.58%	12.25%	19.47%	26.31%	33.33%	46.85%	47.53%	54.84%	63.86%	72.18%	92.62%
TA 2014	3.24%	7.30%	12.59%	20.32%	28.11%	34.96%	46.56%	48.09%	57.18%	65.71%	77.39%	94.76%
TA 2015	3.47%	8.09%	14.47%	21.12%	27.14%	33.71%	47.87%	54.82%	53.17%	62.39%	71.98%	92.73%

(Sumber: DPPKAD Kota Palu, diolah)

Pola penyerapan anggaran yang ekstrim pada tiga bulan terakhir dapat meningkatkan risiko pengelolaan keuangan negara. Kondisi ini menimbulkan kerawanan penyimpangan keuangan negara atau tidak diperolehnya *value for money* dari belanja negara (BPKP, 2012).

Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja dimaksudkan agar diperoleh *value for money* dari belanja pemerintah. Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penyusunan anggaran yang menghubungkan pengeluaran dana publik dengan kinerja yang dihasilkan organisasi. Anggaran kinerja berorientasi pada tujuan dan sasaran kinerja, serta penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan *value for money* dan efektivitas anggaran (Mardiasmo, 2009: 84). Young (2003) juga menyebutkan salah satu pentingnya ABK diterapkan pada organisasi sektor publik adalah dapat diperoleh kegiatan yang lebih efektif dengan biaya yang lebih efisien dalam mencapai tujuan organisasi.

Anggaran Berbasis Kinerja merupakan salah bentuk reformasi pengelolaan sektor publik yang berperan dalam mewujudkan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pendapat Vian (2013) bahwa ABK dirancang untuk dapat mewujudkan *good governance* seperti transparansi dan akuntabilitas dalam hal keputusan alokasi sumber daya anggaran. Young (2003) juga menuliskan dalam bukunya bahwa tujuan utama penerapan ABK adalah akuntabilitas. Informasi kinerja dan data yang digunakan dalam penganggaran membuat pejabat publik, terutama manajer program, bertanggungjawab pada kualitas layanan, efisiensi dalam menetapkan biaya, dan efektif dalam menyusun program.

KNKG (2008) merumuskan salah satu karakteristik yang melekat dalam praktek *good*

*governance* yaitu terkandung nilai-nilai yang membuat penyelenggara negara, pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya dapat lebih efektif bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Akuntabilitas akan mendorong pejabat publik untuk lebih bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang digunakan, sehingga inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya dan kelambanan pelayanan publik dapat berkurang.

Setyo (2007) berpendapat prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi, dan penegakan hukum, apabila dilaksanakan dengan baik dan benar, maka penggunaan dana publik akan dapat dilakukan dengan lebih hemat, efisien dan efektif. Siregar (2012) menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan APBD yang dinilai melalui kinerja *value for money*.

Adanya keterkaitan antara pencapaian kinerja *value for money* dengan penerapan anggaran berbasis kinerja dan *good governance* menjadi latar belakang penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan *Good Governance* terhadap Kinerja *Value for Money* (Survei pada Pemerintah Daerah Kota Palu).”

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

- 1) Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja *value for money*.
- 2) Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap *good governance*.

- 3) Penerapan *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja *value for money*.
- 4) Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja *value for money* melalui *good governance*.

## METODE

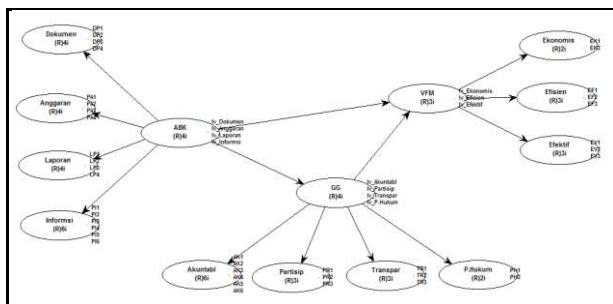
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 41 SKPD yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*.

Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) diukur dengan 4 dimensi, yaitu Dokumen Perencanaan, Penyusunan Anggaran, Laporan Kinerja, dan Informasi Kinerja, dengan total 18 indikator. Dimensi dan indikator yang digunakan diadopsi dari penelitian Vian (2013).

Variabel *good governance* dalam penelitian ini diukur dengan 4 dimensi, yaitu Akuntabilitas, Partisipasi, Transparansi, dan Penegakan Hukum, dengan total 12 indikator. Dimensi dan indikator yang digunakan diadopsi dari penelitian Setyo (2007).

Variabel kinerja *value for money* diukur dengan 3 dimensi, yaitu Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas, dengan total 8 indikator. Dimensi dan indikator yang digunakan diadopsi dari penelitian Dwiputrianti dan Suharsini (2012).

Analisis data menggunakan metode SEM-PLS. Model struktural penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1. Model Struktural Penelitian**

Persamaan untuk model struktural tersebut sebagai berikut:

$$GG = \beta_2 ABK + Z_2 \text{-----} (1)$$

$$VFM = \beta_1 ABK + Z_1 \text{-----} (2)$$

$$VFM = \beta_1 ABK + \beta_3 GG + Z_3 \text{-----} (3)$$

Analisis data menggunakan program WarpPLS 5.0, dilakukan untuk analisis model pengukuran dan analisis struktural. Analisis model pengukuran dilakukan pada *first-order construct* (dimensi-indikator) dan *second-order construct* (variabel-dimensi).

Analisis model pengukuran dilakukan untuk memeriksa validitas (konvergen dan diskriminan) dan reliabilitas konstruk. Validitas konvergen berkaitan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (indikator) dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Kriteria yang digunakan yaitu nilai faktor *loading* lebih besar dari 0,5 dan signifikan pada *p-value* < 0,05, serta nilai *average variance extracted* (AVE) lebih besar dari 0,5. Validitas diskriminan berkaitan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (indikator) dari suatu konstruk seharusnya tidak berkorelasi tinggi dengan konstruk lainnya. Cara mengujinya dengan membandingkan nilai akar kuadrat AVE dengan nilai korelasi antar konstruk. Validitas diskriminan dinilai baik apabila akar kuadrat AVE lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam model.

Analisis model struktural dilakukan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten. Hubungan variabel signifikan apabila *p-value* lebih kecil dari 0,05.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

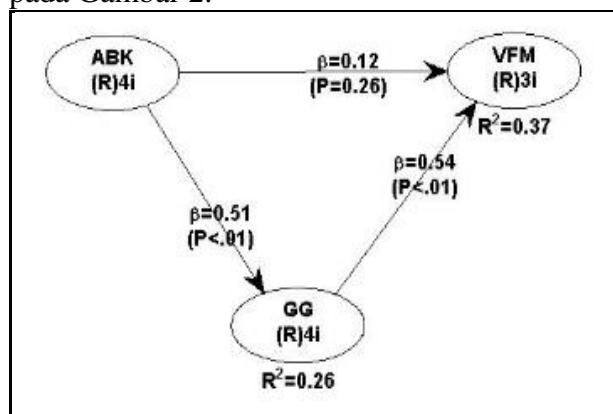
### Analisis Model Pengukuran

Validitas konvergen *first-order construct* terpenuhi setelah indikator ABK41 dan ABK42 dikeluarkan dari model karena memiliki nilai faktor *loading* lebih kecil dari 0,5. Nilai AVE konstruk dimensi lebih besar dari 0,5, kecuali untuk dimensi Anggaran (ABK2) dan Akuntabilitas (GG1), yaitu 0,476 dan 0,466. Validitas diskriminan terpenuhi dengan nilai akar kuadrat AVE lebih besar dari

nilai korelasi antar konstruk dimensi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator konstruk dimensi tidak berkorelasi tinggi dengan konstruk dimensi lainnya. Reliabilitas konstruk terpenuhi dengan nilai *composite reliability* semua konstruk (dimensi) memenuhi nilai standar yaitu lebih besar dari 0,7.

Hasil analisis model pengukuran *second-order construct* menunjukkan semua indikator memenuhi kriteria validitas konvergen, diskriminan, dan reliabilitas konstruk.

Hasil analisis struktural dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2. Analisis Model Struktural**

Berdasarkan nilai koefisien jalur, dibuat persamaan struktural model penelitian sebagai berikut:

$$GG = 0,512ABK + \varepsilon \text{----- (1)}$$

$$VFM = 0,119ABK + \varepsilon \text{----- (2)}$$

$$VFM = 0,119ABK + 0,539GG + \varepsilon \text{----- (3)}$$

Pengaruh langsung variabel ABK terhadap variabel VFM memiliki koefisien jalur sebesar 0,119 dan  $R^2$  sebesar 0,047. Nilai ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai penerapan ABK sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai kinerja VFM sebesar 0,119.  $R^2$  sebesar 0,047 berarti variansi variabel VFM hanya sebesar 4,7% dapat dijelaskan oleh variansi variabel ABK. Pengaruh ini tidak signifikan karena memiliki *p-value* lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,262. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa

penerapan ABK berpengaruh positif terhadap kinerja VFM ditolak.

Pengaruh langsung variabel ABK terhadap variabel GG memiliki koefisien jalur sebesar 0,512 dan  $R^2$  sebesar 0,262. Nilai ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai penerapan ABK sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai penerapan GG sebesar 0,512.  $R^2$  sebesar 0,262 berarti variansi variabel GG sebesar 26,2% dapat dijelaskan oleh variansi variabel ABK. Pengaruh ini signifikan karena memiliki *p-value* lebih kecil dari 0,001. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa penerapan ABK berpengaruh positif terhadap GG diterima.

Pengaruh langsung variabel GG terhadap variabel VFM memiliki koefisien jalur sebesar 0,539 dan  $R^2$  sebesar 0,323. Nilai ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai penerapan GG sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai kinerja VFM sebesar 0,539.  $R^2$  sebesar 0,323 berarti variansi variabel VFM sebesar 32,3% dapat dijelaskan oleh variansi variabel GG. Pengaruh ini signifikan karena memiliki *p-value* lebih kecil dari 0,001. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa penerapan GG berpengaruh positif terhadap kinerja VFM diterima.

Perhitungan pengaruh tidak langsung antara variabel ABK terhadap variabel VFM melalui variabel GG dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Perhitungan Pengaruh Tidak Langsung**

Pengaruh tidak langsung : ABK → GG → VFM	0,512 x 0,539	0,276
Pengaruh langsung : ABK → VFM	0,119	0,119
Pengaruh total		0,395

Nilai pengaruh tidak langsung pada Tabel 2 yaitu 0,276 dan signifikan pada *p-value* 0,021. Dibandingkan dengan pengaruh langsung variabel ABK terhadap variabel GG, yang tidak signifikan karena memiliki *p-value* lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan bahwa penerapan ABK berpengaruh positif terhadap kinerja VFM melalui penerapan GG diterima. Adapun  $R^2$  yang dihasilkan dari pengaruh tidak langsung variabel ABK terhadap variabel VFM melalui variabel GG yaitu sebesar 0,370. Nilai ini berarti variansi variabel VFM sebesar 37% dapat dijelaskan oleh variansi variabel ABK dan GG.

### **Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap kinerja Value for Money**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja (ABK) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja *value for money* (VFM). Hal ini bisa disebabkan karena konsep anggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya diterapkan. Santoso (2012) berpendapat bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja saat ini masih sebatas pada penentuan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, sedangkan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut belum terbahaskan.

Berdasarkan distribusi frekuensi variabel ABK, diketahui bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja melalui penggunaan dokumen perencanaan, penyusunan anggaran berdasarkan kinerja, pembuatan laporan pemantauan kinerja, dan penggunaan informasi kinerja telah dilakukan dengan baik oleh SKPD Kota Palu. Penilaian terhadap kinerja *value for money* juga menunjukkan hasil yang baik. Namun, berdasarkan hasil pengujian statistik, variabel anggaran berbasis kinerja yang diukur oleh dimensi-dimensi ini ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja *value for money*.

Hasil penelitian Ryu (2013) menunjukkan bahwa alokasi anggaran program tidak signifikan berpengaruh pada hasil kinerja. Ryu menemukan bahwa efisiensi program berkaitan dengan ukuran indikator kinerja. Keberhasilan beberapa program sektor publik dalam meningkatkan efisiensinya, sebagian disebabkan karena indikator *output*

yang mudah diukur. Kurrohman (2013) juga menyatakan indikator kinerja yang jelas diperlukan untuk mendukung sistem penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, sasaran (*targets*) yang jelas juga diperlukan agar kinerja dapat diukur dan diperbandingkan sehingga selanjutnya dapat dinilai efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan yang dilaksanakan serta dana yang telah dikeluarkan untuk mencapai output/kinerja yang telah ditetapkan.

Mahmudi (2013:95) merumuskan karakteristik indikator yang baik diantaranya yaitu sederhana dan mudah dipahami, dapat diukur, dikaitkan dengan target kinerja, berfokus pada pelayanan publik, kualitas, dan efisiensi. Indikator kinerja perlu *direview* secara teratur, sebagai upaya menciptakan budaya perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Dengan demikian indikator kinerja yang dibuat dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dalam jangka panjang menghasilkan ukuran kinerja yang lebih baik dan efektif.

### **Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Good Governance**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan penerapan anggaran berbasis kinerja (ABK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance* (GG). Hasil penelitian ini mendukung pendapat Mardiasmo (2009) yang menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja sebagai bentuk dari reformasi penganggaran diperlukan untuk mewujudkan *good governance*. Vian (2013) juga berpendapat bahwa ABK dirancang untuk dapat mewujudkan *good governance* seperti transparansi dan akuntabilitas dalam hal keputusan alokasi sumber daya anggaran.

Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penyusunan anggaran yang menghubungkan pengeluaran dana publik dengan kinerja yang dihasilkan, sehingga alokasi anggaran menjadi lebih rasional. Hal ini dapat mendukung akuntabilitas kepada publik (Young, 2003).

Berdasarkan distribusi frekuensi variabel ABK, diketahui bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja melalui penggunaan dokumen perencanaan, penyusunan anggaran berdasarkan kinerja, pembuatan laporan pemantauan kinerja, dan penggunaan informasi kinerja telah dilakukan dengan baik oleh SKPD Kota Palu. Penerapan *good governance* melalui akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan penegakan hukum juga menunjukkan hasil yang baik. Hasil pengujian statistik menunjukkan variabel anggaran berbasis kinerja yang diukur oleh dimensi-dimensi ini berpengaruh signifikan terhadap *good governance*.

Laporan pemantauan kinerja yang menyajikan informasi capaian kinerja pemerintah merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas penganggaran. Pelaporan capaian kinerja dan penggunaan informasi kinerja merupakan bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas. Mardiasmo (2006) menyatakan pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Hardt dan de Jong (2011), yang menyimpulkan bahwa tujuan utama penerapan ABK salah satunya adalah untuk meningkatkan transparansi belanja pemerintah dan hasil yang terkait, dalam rangka akuntabilitas dan pengawasan. Penyampaian anggaran termasuk hasil yang diharapkan dan yang ditunjukkan, berkontribusi langsung terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dinilai lebih aspiratif dibandingkan sistem anggaran tradisional (BPKP, 2012:12). Hal ini dikarenakan dalam sistem anggaran berbasis kinerja, masyarakat dilibatkan (ikut berpartisipasi) dalam menyusun perencanaan pembangunan. Penyusunan APBD dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan hingga tingkat propinsi. Sehingga kegiatan yang diajukan dalam proses penganggaran dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### **Pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap kinerja *Value for Money***

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan penerapan *good governance* (GG) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *value for money* (VFM). Adanya pengaruh tersebut karena *good governance* memiliki nilai-nilai yang dapat membuat pemerintah bekerja lebih efektif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Apabila nilai-nilai *good governance* diterjemahkan menjadi indikator kinerja seorang pejabat publik atau sebuah satuan birokrasi, maka motivasi untuk bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai *good governance* dengan sendirinya akan berkembang dalam birokrasi publik tersebut. Pejabat publik akan lebih bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang digunakan, sehingga inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya dan kelambanan pelayanan publik dapat berkurang.

Berdasarkan distribusi frekuensi variabel GG, penerapan *good governance* melalui akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan penegakan hukum telah dilakukan dengan baik oleh SKPD Kota Palu. Penilaian terhadap kinerja *value for money* juga menunjukkan hasil yang baik. Hasil pengujian statistik menunjukkan variabel *good governance* yang diukur oleh dimensi-dimensi ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja *value for money*.

Isti'anah (2010) menyatakan penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan akan menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Setyo (2007), yang menunjukkan bahwa *good governance*, yang diukur melalui dimensi partisipasi, transparansi, dan kepatuhan hukum, berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran. Penerapan ketiga unsur tersebut dengan baik dan benar akan membuat dana publik digunakan secara lebih hemat, efisien dan efektif. Hasil penelitian Siregar (2012) juga menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan APBD yang dinilai melalui kinerja *value for money*.

### **Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap kinerja *Value for Money* melalui *Good Governance***

Pengujian hipotesis pada pengaruh tidak langsung penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja *value for money* melalui *good governance* sebagai variabel *intervening* menunjukkan hasil yang signifikan. Penerapan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Transparansi dalam pengelolaan keuangan akan menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja membuat pengelolaan keuangan pemerintah menjadi lebih akuntabel. Akuntabilitas akan mendorong pejabat publik untuk lebih bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang digunakan, sehingga inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya dan kelambanan pelayanan publik dapat berkurang.

Setiawan (2009) berpendapat bahwa manajemen keuangan pemerintah yang baik dapat diwujudkan, antara lain dengan memperhatikan prinsip dan nilai-nilai *good governance*. Hal ini berarti keuangan

pemerintah akan dapat dikelola dengan baik bila didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

Penerapan anggaran berbasis kinerja dan *good governance*, berdasarkan hasil penelitian ini, terbukti berpengaruh meningkatkan kinerja *value for money*. Selain kedua variabel tersebut, terdapat hal lain yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah, seperti struktur birokrasi. Penyederhanaan struktur birokrasi pemerintah akan memberikan implikasi yang sangat besar terhadap perbaikan kinerja birokrasi, efisiensi kegiatan pemerintah, dan proses demokratisasi (Dwiyanto, 2008:30).

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

- 1) Penerapan anggaran berbasis kinerja (ABK) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja *value for money* (VFM) di Pemerintah Daerah Kota Palu.
- 2) Penerapan anggaran berbasis kinerja (ABK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance* (GG) di Pemerintah Daerah Kota Palu.
- 3) Penerapan *good governance* (GG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *value for money* (VFM) di Pemerintah Daerah Kota Palu.
- 4) Penerapan anggaran berbasis kinerja (ABK) berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja *value for money* (VFM) melalui *good governance* (GG) di Pemerintah Daerah Kota Palu.

### **Rekomendasi**

- 1) Pemerintah Daerah Kota Palu diharapkan dapat lebih optimal menggunakan informasi kinerja dalam penyusunan anggaran. Pemerintah Daerah Kota Palu juga diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat untuk mengetahui informasi kinerjanya. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

- 2) Pemerintah Daerah Kota Palu diharapkan dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan anggaran. Misalnya dengan memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proyek-proyek pemerintah, dengan tetap mengikuti dan menaati prosedur dan peraturan yang berlaku.
- 3) Terkait peningkatan kinerja *value for money*, Pemerintah Daerah Kota Palu dapat menerapkan sistem insentif yang menghargai kinerja pegawai. Sistem insentif dapat menciptakan motivasi bagi pegawai untuk memperbaiki kinerja. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi inefisiensi penggunaan anggaran dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat. Pemerintah Daerah Kota Palu juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana untuk mengelola kegiatan. Kualitas dan kuantitas peralatan yang digunakan akan mempengaruhi prosedur, kecepatan proses, dan kualitas *output* yang dihasilkan.
- 4) Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap *value for money*, dapat menambahkan dimensi indikator kinerja pada variabel anggaran berbasis kinerja
- 5) Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel struktur birokrasi pemerintah sebagai variabel yang berpengaruh terhadap kinerja birokrasi dan efisiensi kegiatan pemerintah.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Muslimin, S.E.,M.M. selaku Ketua Tim Pembimbing dan Dr. Abdul Kahar, S.E.,M.Si.,Ak.CA. selaku Anggota Tim Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya serta memberi masukan dan petunjuk dalam proses pembimbingan selama ini.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2012. Mencari Solusi Bagi Serapan yang Tersumbat. *Warta Pengawasan*, Vol. XIX, No. 1, Maret.
- Dwiputrianti, S. dan Suharsini. 2012. Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) Terhadap Efisiensi, Efektifitas, dan Akuntabilitas pada Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi* : Vol. IX, No. 3, Desember.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.[get-file-server/node/8512](http://file-server/node/8512) > [16/6/15]
- Hardt & de Jong. 2011. Implementing Good Governance Approach in Polish Central Government Institutions through Performance Based Budgeting. *Munich Personal Repec Archive (MPRA) Paper*: No. 42240, November 2012.
- Isti'anah. 2010. Penerapan dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik* : Vol. 5, no. 1, Januari, hal. 73-84.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2008. *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*. Jakarta.
- Kurrohman, T. 2013. Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan yang Berbasis Value for Money di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Akuntansi* : Vol. 5, No. 1, Maret, pp. 1-11.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo.. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui



- Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*: Vol. 2, No. 1, Mei.
- Ryu, J. Eungha. 2013. Performance-Based Budgeting (PBB), Allocative Efficiency, And Budget Changes: The Case of The U.S. Department of Commerce. *Public Finance and Management* : Vol. 13, No.4, pp. 335-360.
- Santosa, M. Heru. 2012. Sistem Pengelolaan Keuangan Terintegrasi: Solusi Penyerapan Anggaran. *Warta Pengawasan*, Vol. XIX/No.1: 26–27.
- Setiawan, Awan. 2009. Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah: Sebuah Tinjauan. Makalah. Melalui <http://old.bappenas.go.id/>
- Setyo, Sunoto. 2007. Analisis Pelaksanaan Anggaran Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. *Tesis*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Siregar, Liper. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Apbd Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderator Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar. *Jurnal Sultanist*: Edisi 1, Nopember.
- Vian, T. & Bicknell, W. 2013. Good governance and budget reform in Lesotho Public Hospitals: performance, root causes and reality. *Health Policy and Planning*; 1-12.
- Young, Richard D. 2003. *Performance-Based Budget Systems*. *Public Policy and Practice*. Institute for Public Service and Policy Research. University of South Carolina.